

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

TAHUN 2018

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 memasuki tahun terakhir di tahun 2018. Oleh karena itu, prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 lebih fokus pada percepatan penyelesaian sasaran dan target yang belum tercapai. Selain itu, pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2018.

Tema RKP Tahun 2018 adalah "**Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2018 adalah Holistik, Tematik, Integratif, Dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

A. Kegiatan Strategis Nasional di Jawa Tengah Tahun 2018

Rencana pembangunan nasional tahun 2018 diprioritaskan pada 10 (sepuluh) prioritas dan program prioritas yaitu: 1). Pendidikan (Pendidikan Vokasi dan Pendidikan kualitas guru), 2). Kesehatan (Peningkatan kesehatan ibu dan anak, Pencegahan dan penanggulangan penyakit, Preventif dan promotif/Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), 3). Perumahan dan Permukiman (Penyediaan perumahan layak dan Air bersih dan sanitasi), 4). Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata (Pengembangan 3 dari 10 kawasan pariwisata, Pengembangan 5 dari 10 Kawasan Ekonomi Khusus, Pengembangan 3 dari 14 Kawasan Industri, Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja, dan Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi), 5). Ketahanan Energi (EBT dan konservasi energi dan Pemenuhan kebutuhan energi), 6). Ketahanan Pangan (Peningkatan produksi pangan dan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian termasuk irigasi), 7). Penanggulangan Kemiskinan (Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, Pemenuhan kebutuhan dasar, dan Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi), 8). Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman (Pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat, laut,

udara, dan intermoda dan Pengembangan telekomunikasi dan informatika), 9). Pembangunan wilayah (Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, Pembangunan perdesaan, Reforma agraria, Pencegahan dan penanggulangan bencana, dan Percepatan pembangunan Papua), 10). Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Penguatan pertahanan, Stabilitas politik dan keamanan, Kepastian hukum, dan Reformasi birokrasi).

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2018, maka dalam RKP Tahun 2018 ditetapkan sasaran makro pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 yaitu: 1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,94%; 2). Tingkat kemiskinan sebesar 12,10%; 3). Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,9% (RPJMN 2015-2019).

Kegiatan strategis nasional yang akan dilakukan di Jawa Tengah di tahun 2018 meliputi:

1. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan Sekitarnya, terdiri dari:
 - a. Pengembangan Bandara A. Yani Semarang;
 - b. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas;
 - c. Reaktivasi jalur KA menuju Pelabuhan Tanjung Emas;
 - d. Pembangunan jalur KA menuju Bandara Adi Sumarmo;
 - e. Reaktivasi jalur KA Magelang – Jogja;
 - f. Reaktivasi jalur KA Kedungjati – Tuntang;
 - g. Pembangunan jalur ganda Kroya – Kutoarjo;
 - h. Peningkatan jalan Semarang – Magelang – Jogja;
 - i. Pembangunan jalan tol Trans Jawa ruas jalan Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Pemalang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, dan Semarang-Demak;
 - j. Pembangunan jalan tol Semarang – Solo;
 - k. Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS);
2. Penyediaan dan pengelolaan air baku, meliputi pembangunan jaringan air baku Brebes, Keburejo (Purworejo), Wosokus (Wonogiri), Klambu Kudu (Semarang), Gandrungmangu (Cilacap), dan pembangunan SPAM Semarang Barat;

B. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 diarahkan pada upaya penuntasan capaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dan berbagai permasalahan serta isu strategis, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 ditujukan untuk "**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari**". Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2018 tersebut, ditetapkan **prioritas pembangunan daerah tahun 2018**, meliputi:

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana;
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam **fokus pembangunan**, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia

- pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis dan magang;
- b. Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
 - c. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi;
 - d. Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; kondisi kerja yang kompetitif; perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan; serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
 - e. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan promosi daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata;
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin, difokuskan pada:
- a. Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan berupa: beasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat non kuota APBN, perbaikan rumah tidak layak huni, listrik perumahan, dan jamban;
 - b. Jaminan perlindungan sosial, utamanya bagi kepala rumah tangga miskin non produktif;
 - c. Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS;
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal; pemberdayaan UMKM; permodalan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UKM; pelatihan dan keterampilan kerja di berbagai Balai

-
- Latihan Kerja; pemberdayaan, pelatihan dan pemberian modal bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
- e. Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan ketrampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah;
 - f. Penyediaan Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi Nomor Induk Kependudukan guna memenuhi akses layanan sosial dasar;
 - g. Verifikasi dan validasi sasaran program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan data PBDT 2015;
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, difokuskan pada:
- a. Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP untuk meningkatkan daya tampung siswa lulusan SMP/MTs/SMPLB;
 - b. Penyediaan pendampingan BOS untuk peningkatan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - c. Peningkatan kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/SMK/SLB;
 - d. Pendampingan akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit, Sertifikasi Tenaga Kesehatan, pendampingan masyarakat beresiko kesehatan melalui program OSOC, penyelesaian pentahapan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
 - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - f. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga;
 - g. Pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda untuk meningkatkan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan;
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, difokuskan pada:
- a. Pengembangan komoditas padi gogo, padi lahan salinitas, jagung hibrida dan intensifikasi kedelai;

- b. Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran;
 - c. Pemanfaatan lahan melalui integrated farming system (IFS) untuk komoditas padi, jagung dan kedelai;
 - d. Peningkatan penanaman dan intensifikasi tanaman perkebunan semusim dan tahunan;
 - e. Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing;
 - f. Pengembangan perikanan budidaya melalui pemanfaatan pakan mandiri dan pengembangan perikanan tangkap dengan optimalisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - g. Pembangunan dan pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) serta terwujudnya lumbung cadangan Pemerintah Provinsi;
 - h. Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE) melalui peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan; sambungan listrik murah; fasilitasi perijinan dan jaringan pelayanan serta akses listrik kepada PLN; fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang, Jepara dan Cilacap;
 - i. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap energy mix di Jawa Tengah;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada:
- a. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif jalan nasional/provinsi (sejajar pantura), ruas jalan eks alih status kabupaten/kota, ruas jalan rawan bencana, ruas jalan yang terdapat penyempitan (*bottle-neck*), ruas penghubung wilayah pantai utara-selatan, ruas jalan di perbatasan (Jawa Barat, Jawa Timur dan DIY), peningkatan akses/konektivitas ke wilayah kemiskinan tinggi serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian;
 - b. Penanganan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan (*blackspot*);
 - c. Penataan sistem transportasi massal untuk mengatasi kemacetan melalui peningkatan pelayanan transportasi publik dan keselamatan utamanya percepatan operasionalisasi Angkutan massal aglomerasi Kedungsapur

- (koridor Semarang - Bawen); keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan fasilitasi percepatan rencana Bandara Wirasaba Purbalingga;
- d. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi utamanya pada daerah lumbung pangan melalui peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat;
 - e. Penanganan sungai dan muaranya (pantai) pada daerah rawan banjir dan rob pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali-Comal utamanya di Sungai Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri, Bremsi, Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, Banjir Kanal Timur (BKT), Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, Progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah Pantura;
 - f. Penanganan bangunan penampungan air pada daerah rawan kekeringan melalui peningkatan ketersediaan air baku dengan memperbanyak pembangunan embung/penanganan tampungan air sebagai bagian dari "program pembangunan 1.000 embung" serta mendorong dukungan Nasional, Kabupaten/kota dan masyarakat/ swasta terhadap program tersebut;
 - g. Penanganan infrastruktur air minum melalui peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pengembangan SPAM Regional (Bregas, Keburejo); pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih;
 - h. Penanganan sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan/ miskin pedesaan melalui pembangunan MCK Komunal dan Dukungan Program SANIMAS serta rintisan pengelolaan IPLT;
 - i. Pengelolaan sampah/TPA melalui percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional (TPA Regional Magelang);
 - j. Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui rehabilitasi dan konservasi DAS termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir;

- k. Pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui program penilaian kinerja perusahaan dan program kali bersih, pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM untuk menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah;
 - l. Penyediaan logistik untuk mencukupi kebutuhan kabupaten/kota terdampak bencana;
 - m. Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana;
 - n. Pengembangan Early Warning System bencana berbasis masyarakat;
 - o. Pengembangan masyarakat tangguh bencana;
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada:
- a. Pemantapan kondusivitas wilayah dan antisipasi terhadap dampak Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kehidupan berdemokrasi;
 - c. Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu:
 - 1) Manajemen perubahan yang dilaksanakan antara lain melalui implementasi penetapan *agent of change* (Kader Revolusi Mental) dan kode etik Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Penguatan Pengawasan yang bebas dari KKN melalui implementasi Aksi PPK; penerapan SPIP, pembangunan Zona Integritas, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media; optimalisasi SIMWAS-Online untuk percepatan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan;
 - 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui optimalisasi penggunaan e-SAKIP; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik;
 - 4) Penataan dan Penguatan Organisasi melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, penataan kelembagaan non struktural;

- 5) Penataan Tatalaksana meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi dan pembentukan PTSP;
 - 6) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional, dan berkinerja tinggi melalui pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, penyusunan kelas jabatan dan pola pembinaan karir yang terbuka;
 - 7) Peraturan Perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif serta selaras melalui penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; pemantauan dan evaluasi Perda/Perkada secara berkala;
 - 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi dengan menyusun Standart Operasional Prosedure dan penyediaan media pengaduan masyarakat;
- d. Peningkatan kualitas penyusunan laporan pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;
 - e. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi, kompeten, kapabel, berintegritas, serta didukung oleh sistem pembinaan karir yang jelas dan terbuka (merit system);
 - f. Peningkatan layanan publik melalui perluasan cakupan pengukuran kinerja unit layanan publik, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. Gerakan revolusi mental yang berorientasi pada nilai-nilai utama yaitu integritas, peningkatan etos kerja dan budaya gotong-royong;
 - h. Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah melalui pagelaran dan pertunjukan kesenian rakyat;
 - i. Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keimanan dan ketaqwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS guna menangkal upaya destruktif;

- j. Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan melalui pembangunan asrama atlet dan gedung terpadu II di Jatidiri.

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 merupakan upaya guna mencapai target **sasaran makro pembangunan daerah** tahun 2018 yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 – 6,2%;
2. Laju inflasi sebesar 4,5 ± 1%;
3. PDRB per kapita sebesar Rp. 27,13 juta;
4. Indeks Gini sebesar 0,337 dan Indeks Williamson sebesar 0,6986;
5. Persentase penduduk miskin sebesar 10,40 – 9,93%;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,59, dengan komponen:
 - a. Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 75,05 tahun;
 - b. Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,35 tahun;
 - c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,15 tahun;
 - d. Pengeluaran per Kapita Yang Disesuaikan sebesar 10.334,75 ribu per tahun;
7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 69,99 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 71,99;
8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,13%; dan
9. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103,27.

C. PENJABARAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 selain guna mencapai target sasaran pembangunan daerah tahun 2018, juga untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2018. Guna melihat adanya dukungan dan keterkaitan antara kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 dengan kebijakan pembangunan nasional, dapat digambarkan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Penjabaran Pelaksanaan Prioritas Nasional Oleh Pemerintah Daerah Tahun 2018

No	Prioritas Nasional	Strategi Pembangunan Nasional	Isu Strategis	Prioritas Daerah/Fokus
1	2	3	4	4
1	1. PN 4: Pengembangan dunia usaha dan pariwisata 2. PN 7: Penanggulangan kemiskinan	Dimensi sektor unggulan	a. Pengurangan kemiskinan b. Pengurangan pengangguran	Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan: a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM b. Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha c. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi d. Pengembangan ketenagakerjaan e. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah
2	1. PN 3: Perumahan dan Permukiman 2. PN 7: Penanggulangan kemiskinan	a. Dimensi pembangunan manusia b. Dimensi sektor unggulan	Pengurangan Kemiskinan	Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin: a. Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan b. Jaminan perlindungan sosial c. Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS d. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal e. Pengembangan kewirausahaan pemuda f. Penyediaan Data PMKS yang terintegrasi NIK g. Verifikasi dan validasi sasaran program KJS

No	Prioritas Nasional	Strategi Pembangunan Nasional	Isu Strategis	Prioritas Daerah/Fokus
1	2	3	4	4
3	1. PN 1: Pendidikan 2. PN 2: Kesehatan 3. PN 7: Penanggulangan Kemiskinan	Dimensi pembangunan manusia	Pengurangan Kemiskinan	Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar: a. Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP b. Penyediaan pendampingan BOS c. Peningkatan kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/SMK/SLB d. Peningkatan pelayanan kesehatan e. Peningkatan pelayanan sosial f. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak g. Peningkatan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan
4	1. PN 5: Ketahanan Energi 2. PN 6: Ketahanan Pangan	Dimensi sektor unggulan	a. Kedaulatan pangan b. Kedaulatan energi	Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan: a. Pengembangan komoditas pertanian dan pangan b. Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran c. Pemanfaatan lahan melalui <i>integrated farming system</i> (IFS) d. Peningkatan penanaman dan intensifikasi tebu; e. Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing f. Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap g. Pengembangan lumbung cadangan pangan h. Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE); i. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

No	Prioritas Nasional	Strategi Pembangunan Nasional	Isu Strategis	Prioritas Daerah/Fokus
1	2	3	4	4
5	1. PN 3: Perumahan dan Permukiman 2. PN 6: Ketahanan Pangan 3. PN 8: Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman 4. PN 9: Pembangunan Wilayah	a. Dimensi sektor unggulan b. Dimensi pemerataan dan kewilayahan	Pembangunan Infrastruktur	Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana: a. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan b. Penanganan infrastruktur perhubungan c. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi dan sumberdaya air lainnya d. Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan dan miskin pedesaan serta pengelolaan sampah/TPA e. Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah f. Mitigasi dan penanganan bencana
6	1. PN 10: Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Mendukung kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi, dan Kondusivitas Wilayah	Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik: a. Pemantapan kondusivitas wilayah b. Peningkatan partisipasi masyarakat c. Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi d. Gerakan revolusi mental e. Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah f. Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keimanan dan ketaqwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS g. Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan

D. PENJABARAN PELAKSANAAN PROGRAM PER URUSAN

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan tahun 2018, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2018 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada :</p> <p>a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Produk/komoditas OVOP (komoditas) ▪ Presentase koperasi sehat (%) ▪ Persentase koperasi aktif (%) ▪ Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) ▪ Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%) ▪ Pertumbuhan Proyek PMA/PMDN (%) ▪ Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN (%) ▪ Penyelesaian Izin dan Non Izin sesuai SOP (%) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM ▪ Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal ▪ Program Peningkatan Ekspor, Promosi, dan Efisiensi Impor ▪ Program 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Koperasi dan UMKM ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan ▪ Dinas Penanaman Modal ▪ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ▪ Dinas Kepemudaan, 	<ul style="list-style-type: none"> • KOPERASI DAN UMKM • INDUSTRI • PERDAGANGAN • PENANAMAN MODAL • KETENAGAKERJAAN • PORA

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis dan magang;</p> <p>b. Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) ▪ Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja (%) ▪ Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang) ▪ Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang) 	<p>Pengembangan Industri Logam, Mesin, dan Tekstil</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, dan Hasil Hutan ▪ Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka ▪ Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi ▪ Program Peningkatan Kesempatan Kerja ▪ Program Pemasaran Pariwisata 	<p>OR, dan Pariwisata</p>	

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>c. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi;</p> <p>d. Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; kondisi kerja yang kompetitif; perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial</p>				

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>ketenagakerjaan; serta pening-katan kesejahteraan tenaga kerja;</p> <p>e. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan promosi daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata.</p>				

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin, dengan fokus pada :</p> <p>a. Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan berupa : beasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat non kuota APBN, perbaikan rumah tidak layak huni, listrik perumahan, dan jamban;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Rumah Layak Huni ▪ Persentase penanganan PMKS (%) ▪ Jumlah Desa Mandiri/Berdikari ▪ Jumlah BUMDes yang difasilitasi (unit) ▪ Jumlah kewirausahaan pemuda (orang) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pembangunan Perumahan ▪ Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya ▪ Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perumahan dan Permukiman ▪ Dinas Sosial ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Capil ▪ Dinas PORA dan Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN • SOSIAL • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA • ADM. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL • PORA

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>b. Jaminan perlindungan sosial, utamanya bagi kepala rumah tangga miskin non produktif;</p> <p>c. Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS;</p> <p>d. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal; pemberdayaan UMKM; permodalan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UKM; pelatihan dan keterampilan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja; pemberdayaan, pelatihan dan pemberian modal bagi</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Fasilitas Pengembangan Masyarakat dan Desa ▪ Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat ▪ Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>Keluarga Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi;</p> <p>e. Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan ketrampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah;</p> <p>f. Penyediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi Nomor Induk Kependudukan guna memenuhi akses layanan sosial dasar;</p>				

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
g. Verifikasi dan validasi sasaran program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan data PBDT 2015.				
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, dengan fokus pada : a. Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP untuk meningkatkan daya tampung siswa lulusan SMP/MTs/SMPLB.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APK SMA/SMALB/MA/ SMK/ Paket C ▪ APM SMA/SMALB/MA/ SMK/ Paket C ▪ Angka Kelulusan SMA/MA/SMK ▪ % SMA/ SMALB/ MA/SMK yang terakreditasi ▪ % Pendidik SMA/SMALB/MA/SMK berkualifikasi S1/D4 ▪ Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pendidikan Menengah ▪ Program Pendidikan Khusus ▪ Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ▪ Program Pencegahan dan Penanggulangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Dinas Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PENDIDIKAN ▪ KESEHATAN

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>b. Penyediaan pendampingan BOS untuk peningkatan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.</p> <p>c. Peningkatan kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/SMK/SLB.</p> <p>d. Pendampingan akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit, Sertifikasi Tenaga Kesehatan, pendampingan masyarakat beresiko kesehatan melalui program OSOC, penyelesaian pentahapan pemenuhan sarana</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH) ▪ Angka Kematian Balita (AKBA) (per 1.000 KH) ▪ Angka Kematian DBD (%) ▪ Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk) ▪ Jumlah sarana dan prasarana sosial (unit) ▪ Persentase penguatan kapasitas PSKS (%) 	<p>Penyakit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pelayanan Kes. ▪ Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ▪ Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SOSIAL

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>dan prasarana Rumah Sakit.</p> <p>e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).</p> <p>f. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak serta pembangunan keluarga.</p> <p>g. Pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda untuk meningkatkan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan.</p>				

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, dengan fokus pada:</p> <p>a. Pengembangan komoditas padi gogo, padi lahan salinitas, jagung hibrida dan intensifikasi kedelai;</p> <p>b. Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran;</p> <p>c. Pemanfaatan lahan melalui integrated farming system (IFS) untuk komoditas padi, jagung dan kedelai;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produksi padi (ton) ▪ Produksi Jagung (ton) ▪ Produksi Kedelai (ton) ▪ Produksi Tebu (ton) ▪ Produksi Daging (kg) ▪ Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) ▪ Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%) ▪ Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%) ▪ Jumlah Regulasi Kedaulatan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pengembangan Agribisnis ▪ Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian ▪ Program Peningkatan Ketahanan Pangan ▪ Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan ▪ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ▪ Dinas Ketahanan Pangan ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PERTANIAN ▪ PERTANIAN ▪ PERTANIAN ▪ KELAUTAN DAN PERIKANAN

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>d. Peningkatan penanaman dan intensifikasi tanaman perkebunan semusim dan tahunan;</p> <p>e. Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing;</p> <p>f. Pengembangan perikanan budidaya melalui pemanfaatan pakan mandiri dan pengembangan perikanan tangkap dengan optimalisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;</p> <p>g. Pembangunan dan pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) serta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan Pangan Utama (ton) beras ▪ Persentase Penguatan Cadangan Pangan (%) ▪ Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di daerah (%) ▪ Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) ▪ Persentase daerah rawan pangan (%) ▪ Produksi perikanan tangkap (ribu ton) ▪ Produksi perikanan budidaya (ribu ton) ▪ Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan ▪ Program Pengembangan Perikanan Tangkap ▪ Program Pengembangan Perikanan Budidaya ▪ Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan 		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
terwujudnya lumbung cadangan Pemerintah Provinsi;				
h. Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE) melalui peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan, sambungan listrik murah; fasilitasi perijinan dan jaringan pelayanan serta akses listrik kepada PLN; fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang, Jepara, dan Cilacap;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Elektrifikasi (%) ▪ Persentase pemanfaatan EBT terhadap total konsumsi energi (%) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas ▪ Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas ESDM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
i. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap <i>energy mix</i> di Jawa Tengah.				
<p>5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada :</p> <p>a. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yg merupakan ruas alternatif jalan nasional/provinsi (sejajar pantura), ruas jalan eks alih status</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%) ▪ Persentase panjang jalan dengan lebar $\geq 6,00$ m (%) ▪ Persentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8 ton) (%) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan ▪ Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya ▪ Dinas Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • PUPR • PERHUBUNGAN

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>kabupaten/kota, ruas jalan rawan bencana, ruas jalan yang terdapat penyempitan (<i>bottle-neck</i>), ruas penghubung wilayah pantai utara-selatan, ruas jalan di perbatasan (Jawa Barat, Jawa Timur, dan DIY), peningkatan akses/konektivitas ke wilayah kemiskinan tinggi serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian.</p> <p>b. Penanganan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan keselamatan pada daerah rawan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis ▪ Peningkatan ketersediaan prasarana keselamatan: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan provinsi (%) - Perlintasan KA di jalan provinsi (lokasi) ▪ Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%) ▪ Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (%) ▪ Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir (Ha) ▪ Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi (%): <ul style="list-style-type: none"> - Air Minum Perkotaan - Air Minum Perdesaan - Sanitasi ▪ Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (%) ▪ Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%) ▪ Informasi status mutu air (%) 	<p>dan Jembatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan ▪ Program Pengembangan Perhubungan Darat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya ▪ Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku ▪ Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air dan Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretariat BPBD 	<ul style="list-style-type: none"> • LINGKUNGAN HIDUP • SOSIAL

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>kecelakaan (<i>blackspot</i>);</p> <p>c. Penataan sistem transportasi massal untuk mengatasi kemacetan melalui peningkatan pelayanan transportasi publik dan keselamatan utamanya percepatan operasionalisasi angkutan massal aglomerasi Kedungsepur (koridor Semarang-Bawen); keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan fasilitasi percepatan rencana Bandara Wirasaba Purbalingga;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi status mutu udara ambien (%) ▪ Persentase pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (%) ▪ Desa Tangguh Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi ▪ Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan ▪ Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan ▪ Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan ▪ Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam ▪ Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>d. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi utamanya pada daerah lumbung pangan melalui peningkatan kondisi jaringan irigasi tersinkronisasi dengan kabupaten/kawasan penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat;</p> <p>e. Penanganan sungai muaranya (pantai) pada daerah rawan banjir dan rob pada wilayah sungai Bodri Kuto dan Pemali-Comal utamanya di Sungai Bodri, Kendal, Blukar, Damar,</p>				

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>Bulanan, Meduri, Breml, Pemali, Comal, serta mendorong pada wilayah sungai kewenangan pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, Banjir Kanal Timur (BKT), Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, Progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo, dan sabuk pantai di wilayah pantura;</p> <p>f. Penanganan bangunan penampungan air pada daerah rawan kekeringan melalui peningkatan</p>				

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>ketersediaan air baku dengan memperbanyak pembangunan embung/penanganan tampungan air sebagai bagian dari "program pembangunan 1.000 embung" serta mendorong dukungan nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat/swasta terhadap program tersebut;</p> <p>g. Penanganan infrastruktur air minum melalui peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi</p>				

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>pengembangan SPAM Regional (Bregas, Keburejo); pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih;</p> <p>h. Penanganan sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan dan miskin pedesaan melalui pembangunan MCK komunal dan dukungan program SANIMAS serta rintisan pengelolaan IPLT;</p> <p>i. Pengelolaan sampah/TPA melalui percepatan pembangunan Tempa Pembuangan Akhir</p>				

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<p>Sampah Regional (TPA Regional);</p> <p>j. Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) melalui rehabilitasi dan konservasi DAS termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir;</p> <p>k. Pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui program penilaian kinerja perusahaan dan program kali bersih, pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM untuk menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah;</p>				

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	5	6	
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="271 371 589 563">l. Penyediaan logistik untuk mencukupi kebutuhan kabupaten/kota terdampak bencana. <li data-bbox="271 571 589 762">m. Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana. <li data-bbox="271 770 589 930">n. Pengembangan <i>Early Warning System</i> bencana berbasis masyarakat. <li data-bbox="271 938 589 1050">o. Pengembangan masyarakat tangguh bencana. 				

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	4	5	
<p>6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada :</p> <p>a. Pemantapan kondusivitas wilayah dan antisipasi terhadap dampak Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi.</p> <p>b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kehidupan berdemokrasi.</p> <p>c. Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu:</p> <p>1) Manajemen perubahan yang dilaksanakan antara lain melalui implementasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase penanganan konflik sosial ▪ Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) ▪ Persentase penggunaan hak pilih dalam: <ul style="list-style-type: none"> - Pemilu legislatif - Pemilu presiden dan wapres - Pemilu gubernur dan wagub - Pilkada kabupaten/kota ▪ Rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan ▪ Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat ▪ Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bakesbangpol ▪ Biro Hukum ▪ Badan PP, PA, Dalduk dan KB ▪ BP4D ▪ Inspektorat ▪ Dinas Kominfo ▪ BKD ▪ BPKAD ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN • PP DAN PA • DALDUK KB • KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA • PENDIDIKAN • KEBUDAYAAN

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	4	5	
<p>penetapan <i>agent of change</i> (Kader Revolusi Mental) dan kode etik Aparatur Sipil Negara.</p> <p>2) Penguatan Pengawasan yang bebas dari KKN melalui implementasi Aksi PPK; penerapan SPIP, pembangunan Zona Intregitas, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media; optimalisasi SIMWAS-Online untuk percepatan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan.</p> <p>3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase pelaksanaan rembug masyarakat dalam pengambilan keputusan (%) ▪ Implementasi Aksi PPK ▪ Jumlah OPD yang menerapkan SPIP (OPD) ▪ Tingkat Maturitas SPIP (level) ▪ Tingkat Kapabilitas APIP (level) ▪ Jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang disusun (perda) ▪ Persentase penindakan pelanggaran perda (%) ▪ Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM (unit UPP) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan ▪ Program Perencanaan Pembangunan Daerah ▪ Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH ▪ Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan ▪ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ▪ Program Peningkatan SDM Bidang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kepemudaan, OR, dan Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • PORA • PARIWISATA

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	4	5	
<p>optimalisasi penggunaan e-SAKIP; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik.</p> <p>4) Penataan dan Penguatan Organisasi melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, penataan kelembagaan non struktural.</p> <p>5) Penataan Tatalaksana meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO (unit UPP) ▪ Persentase OPD yang mengembangkan teknologi informasi (%) ▪ Jumlah PNS yang mengikuti sertifikasi kompetensi (orang) ▪ Jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar (orang) ▪ Opini BPK (WTP) ▪ Persentase laporan keuangan daerah berbasis aktual (%) ▪ Persentase deviden ▪ Persentase penerapan wawasan kebangsaan, 	<p>Komunikasi dan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah ▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ▪ Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	4	5	
<p>efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi dan pembentukan PTSP.</p> <p>6) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional, dan berkinerja tinggi melalui pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, penyusunan kelas jabatan dan pola pembinaan karir yang terbuka.</p>	<p>bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Kesiapsediaan komponen pendukung dan cadangan (%) ▪ Persentase penerapan indikator SPM kesenian (Gelar Seni, Sarana Kesenian, Penyelenggaraan Misi Kesenian) (%) 			

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	4	5	
<p>7) Peraturan Perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif serta selaras melalui penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; pemantauan dan eval.Perda/Perkada secara berkala.</p> <p>8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%) ▪ Penerapan kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (%) ▪ Persentase peningkatan prestasi olahraga (%) ▪ Persentase cakupan <i>venue sport and youth center</i> Jatidiri yang memadai (%) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya ▪ Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya ▪ Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan 		

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	4	5	
<p>kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi dengan menyusun <i>Standart Operasional Prosedure</i> dan penyediaan media pengaduan masyarakat.</p> <p>d. Peningkatan kualitas penyusunan laporan pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.</p> <p>e. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi, kompeten, kapabel, berintegritas, serta didukung oleh sistem pembinaan karir yang jelas</p>				

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	4	5	
<p>dan terbuka (<i>merit system</i>).</p> <p>f. Peningkatan layanan publik melalui perluasan cakupan pengukuran kinerja unit layanan publik, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>g. Gerakan revolusi mental yang berorientasi pada nilai-nilai utama yaitu integritas, peningkatan etos kerja dan budaya gotong-royong.</p>				

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	PD Penanggung Jawab	Urusan
1	2	4	5	
<p>h. Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah melalui pagelaran dan pertunjukan kesenian rakyat.</p> <p>i. Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keimanan dan ketaqwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS guna menangkal upaya destruktif.</p> <p>j. Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan melalui pembangunan asrama atlet dan gedung terpadu II di Jatidiri.</p>				